

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI



**Oleh
Ewin
160710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Ewin
160710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ewin
NPM : 160710008
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Analisis Yuridis Terhadap Dewan Pengawas Terkait Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 26 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



Ewin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ewin', is written over the stamps and extends to the right.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Ewin
160710008**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Januari 2021



**Lenny Husna, S.H.,M.H.
Pembimbing**



ABSTRAK

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tergolong sangat memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, dikarekan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga supervisi dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat bekerja maksimal, akan tetapi terbentuknya Dewan Pengawas didalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi celah sebagai penghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dewan pengawas terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah dibentuknya Dewan Pengawas didalam struktur lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat mempengaruhi kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, melalui Pasal 12B, Pasal 37B dapat mencederai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen, dan dengan munculnya Dewan Pengawas malah akan mempengaruhi proses projustitia, karena dewan pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidaknya terhadap proses penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Yang pada Undang-Undang sebelumnya tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan terkait kegiatan diatas ke pihak tertentu.

Kata Kunci: *Pengawasan, Independensi, dan Dewan Pengawas*

ABSTRACT

The performance of the Corruption Eradication Commission in Indonesia is quite satisfactory in recent years, the institution of the Corruption Eradication Commission is a supervision institution in carrying out its duties so that it can work optimally, but the establishment of a Supervisory Board in the structure of the Corruption Eradication Commission can be a loophole as an obstacle to the Corruption Eradication Commission in carrying out its duties. The purpose of this study is to examine more about the supervisory board of this eradication commission used by the author is normative research by reviewing the law as the norm. The results of the research with the establishment of the Board of Trustees within the structure of the Corruption Eradication Commission institutions, can affect the performance of the institution of the Corruption Eradication Commission itself. Because basically the Corruption Eradication Commission is an independent institution, and with the emergence of the Board of Trustees will instead affect the pro-justitia process.

Keyword: *supervision, independence, supervisory board, performance.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DEWAN PENGAWAS TERKAIT KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sastra satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Karena itu kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendaha hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Djamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sastra I Ilmu Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.

4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, yang telah banyak membantu selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
6. Kedua Orang tua dan Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dari mulai awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi .
7. Yuliana, S.Ak, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari mulai proses awal pembuatan skripsi sampai selesai.
8. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Batam, 22 Januari 2021



Ewin



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis	12
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kerangka Teori	15
2.1.1 Teori Pengawasan	15
2.1.2 Teori Independensi	15
2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Kinerja	16
2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Analisis Yuridis	17
2.1.5 Tinjauan Umum mengenai Dewan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi	17
2.1.6 Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi	18
2.1.7 Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi	18
2.1.8 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002	19
2.1.9 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019	25
2.1.10 Dasar Hukum dan Pengertian Dewan Pengawas	34
2.1.11 Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi	34
2.2 Kerangka Yuridis	36
2.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	36
2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	36
2.3 Penelitian Terdahulu	37

2.4	Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
3.2	Metode Pengumpulan Data	44
3.2.1	Jenis Data	44
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	45
3.3	Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	47
4.1.1	Pengaruh Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	47
4.1.2	Dampak Pembentukan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	49
4.2	Pembahasan	51
4.2.1	Pengaruh Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	51
4.2.2	Dampak Pembentukan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan.....	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	42
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel Data	63
Tabel 4.2	Tabel Data	65